1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Aceh Timur pada triwulan III Tahun 2026 bertepatan dengan Tahun Ajaran Baru dan panen raya bawang cabai serta Maulid Nabi. Inflasi Aceh pada periode ini menunjukkan tren penurunan yoy 2,5%+1% setelah panen dan stabilisasi distribusi. Cabai Merah: Rp 52.000 → Rp 35.000/kg Cabai Rawit: Rp.68 .000 → Rp 40.000/kg Bawang Merah: Rp 40.000 → Rp 28.000/kg Minyak Goreng Curah: Rp 16.500/L stabil (OPM) Emas Perhiasan: Rp 3,10 jt/mayam ke 3,15 jt/mayam(pendorong /yoy) Pendorong inflasi yoy: emas perhiasan, tarif listrik, beras, nasi dengan lauk, rokok kretek.

Secara keseluruhan, perkembangan IPH di Kabupaten Aceh Timur pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan :

1. Juli 2026 : 0,30% mtm dan 4,40% yoy (Tahun Ajaran Baru)
2. Agustus 2026 : 0,10% mtm dan 3,90% yoy (deflasi- panen jagung dan Bawang)
3. September 2026 : 0,35% mtm dan 3,75% yoy (Maulid Nabi)

Komoditas penyumbang IPH dominan pendorong Inflasi yaitu Beras Medium, Cabai Merah,minyak goreng, Telur ayam Ras , Daging Ayam Ras.

Rata -rata mtm 0,18% terendah tahun 2026

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi permasalahan pengendalian inflasi yang bersifat struktural sebagaimana pada triwulan sebelumnya. Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan kendala cuaca yang memengaruhi distribusi tetap menjadi isu utama. Di samping itu, gejolak harga pada komoditas hortikultura dan daging ayam ras semakin menegaskan perlunya penguatan strategi pengendalian inflasi daerah.

Permasalahan yang Diidentifikasi:

1. Ketergantungan Suplai dari Daerah Lain
   - Sebagian besar kebutuhan pangan pokok di Kabupaten Aceh Timur masih bergantung pada pasokan dari Medan dan wilayah Aceh Tengah. Kondisi ini menjadikan harga pangan di Aceh Timur sangat rentan terhadap perubahan harga di daerah pemasok.
   - Pada Bulan April sampai Juni , ketergantungan terhadap pasokan komoditas pangan terlihat semakin jelas, tercermin dari kenaikan harga bawang merah, cabai merah, serta beberapa bahan pokok lainnya, termasuk terjadinya kelangkaan LPG dan Bahan Bakar Minyak, yang mendorong peningkatan IPH secara cukup signifikan. Kondisi ini berpotensi semakin menekan stabilitas harga, terutama ketika hari Maulid Nabi, saat permintaan bahan pangan meningkat.

Kendala Cuaca dan Kondisi Perairan

1.
   - Cuaca yang tidak menentu pada periode Juli – September berpotensi mengganggu arus distribusi bahan pangan dari Medan ke Aceh Timur.
   - Kondisi perairan yang kurang mendukung juga dapat memengaruhi kelancaran transportasi barang dan hasil tangkapan laut. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya pasokan pangan tertentu yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

   - Operasi Pasar Murah: 12 kali di bebearapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur (beras SPHP, minyak goreng)
   - Sidak Pasar & Distributor: Harian via SP2KP oleh Disperindagkop UKM
   - Kerjasama Antar Daerah (KAD): Dengan Kota Langsa & Kab. di Sumut untuk pasokan cabai & bawang
   - Gerakan Menanam: 15.000 polybag cabai untuk 300 KK (Gerakan SIGANTANG) Realisasi Belanja Wajib: 35% dari APBK untuk perlindungan sosial & bantuan pangan
   - Dukungan Transportasi: Subsidi ongkos angkut BTT dari Pelabuhan Kuala Idi
   - Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Timur melakukan pemantauan dan pengendalian harga di pasar induk dan sekitarnya setiap hari kerja.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Timur pada **Triwulan III Tahun 2026** adalah sebagai berikut:

   1. **Gerakan menanam di pekarangan** tetap dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit yang pada Juli – September terbukti menjadi penyumbang utama kenaikan IPH. Program ini membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
   2. **Ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran** masih terjadi, tercermin dari lonjakan harga bawang merah dan cabai merah di bulan Juli. Hal ini menegaskan kembali pentingnya ketersediaan **data neraca pangan secara berkala** untuk memperkuat dasar kebijakan, terutama dalam mengantisipasi periode permintaan tinggi menjelang Perayaan Maulid Nabi.
   3. **Kerja sama antar** daerah penghasil komoditas strategis tetap dijalankan, khususnya dengan Medan dan Aceh Tengah. Namun, tingginya harga dari daerah pemasok masih berdampak langsung ke Kabupaten Aceh Timur. Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat mekanisme koordinasi pasokan agar harga di Aceh Timur lebih stabil.
   4. **Diversifikasi jaringan pemasok** menjadi penting untuk mengurangi risiko ketergantungan. Pada TW III, kondisi cuaca dan dampak bencana banjir bandang yang mengganggu arus distribusi. Oleh karena itu, penambahan alternatif pemasok yang lebih efisien dan terjangkau tetap menjadi evaluasi utama.

Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pedagang dan distributor lokal juga

5. terus didorong agar mereka mampu mengantisipasi fluktuasi harga komoditas hortikultura (cabai, bawang) serta daging ayam ras yang masih bergejolak pada periode ini.
6. **Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan** menjadi kunci. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TPID, swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam menjaga ketersediaan pasokan, memperkuat distribusi, dan melakukan operasi pasar apabila diperlukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Timur pada triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas penting.
2. Meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan produksi pangan secara mandiri oleh
3. Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Timur menyampaikan laporan harian melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
4. Inspektur Kabupaten Aceh Timur melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menyampaikan laporan setiap hari kepada Kemendagri dalam rangka penanganan inflasi di Daerah.
5. Melakukan 6 Upaya Konkrit dalam Penanganan Inflasi di Daerah, yaitu:
    1. Melakukan operasi pasar murah;
    2. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
    3. Kerjasama dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
    4. Melakukan Gerakan Menanam;
    5. Merealisasikan Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Aceh Timur dan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Kabupaten Aceh Timur;
    6. Dukungan Transportasi dari APBD.